

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024



**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**

**MANOKWARI
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud	2
C. Tujuan	3
D. Landasan Hukum	3
E. Dasar Pembentukan Organisasi	5
F. Tugas dan Fungsi	6
G. Struktur Organisasi	7
H. Sumber Daya Manusia	8
H.1. Jumlah Pejabat Struktural	9
H.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	10
H.3. Tingkat Pendidikan Diklat Struktural	11
H.4. Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	12
H.5. Daftar Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Struktural Biro Pemerinitahan	13
H.6. Daftar Pegawai Honorrer	16

I	Sarana dan Prasarana	17
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A.	Rencana Strategis	19
1.	Visi	20
2.	Misi	20
3.	Strategi Dan Kebijakan	21
4.	Tujuan	24
5.	Sasaran Strategis	24
B.	Program dan Kegiatan Tahun 2024	25
C.	Tabel RINGKASAN RENCANA KERJA 2024	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	Capaian Kinerja Tahun 2024	28
	Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	28
	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
	Ringkasan indikator kinerja utama (IKU)	30
	Program dan kegiatan	23
	Tabel T.C27	35
	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025	36
B.	Akuntabilitas Keuangan	39
	Tabel Rencana Anggaran Tahun 2024	39
	Realisasi Anggaran Tahun 2024	41

Tabel Realisasi Anggaran Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah	63
Tabel Realisasi Anggaran Fasilitas Pengelolaan Pemerintahan Umum	65
Tabel Realisasi Evaluasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan	67
Tabel Realisasi Anggaran Fasilitas Penataan Wilayah	69
Tabel Realisasi Anggaran Pengembangan Otonomi Dan Penataan Urusan	71
Tabel Realisasi Anggaran Fasilitas Kdh	74
Tabel Realisasi Anggaran Evaluasi Kerja Sama	77
Tabel Realisasi Anggaran Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah	78
Tabel Realisasi Anggaran Fasilitas Kerjasama Badan Swasta	79
Tabel Realisasi Anggaran Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
C. Lampiran Foto-Foto Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024	

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama
2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

4. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Papua Barat terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dengan dinamikanya tersendiri telah mengantarkan pemerintahan ini kurang lebih 18 (delapan belas) Tahun. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat dipimpin Sekretaris Daerah telah menyusun Renstra tahun 2023-2026 dengan permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian untuk diselesaikan adalah Permasalahan Batas wilayah, baik dengan provinsi tetangga juga permasalahan batas wilayah antar kabupaten/kota dalam provinsi Papua Barat, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang masih perlu mendapatkan perhatian serius dari Kabupaten/Kota untuk penyampaian tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat merupakan salah satu Wujud Pertanggungjawaban Biro Pemerintahan kepada Gubernur Papua Barat dan Publik atas kinerja dan capaian Visi dan Misi. Visi Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahterah, Bermartabat serta **Misi ke- 1** yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif dan **Misi Ke- 2** yaitu mewujudkan pengelolaan lingkungan dn sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2023-2026.

LAKIP Tahun 2024 merupakan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di susun dalam rencana kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2024. Pemerintah telah menerapkan suatu system Pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja secara terpadu dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah di perlukan langkah-langkah penguatan Kewenangan, Akuntabilitas kinerja kelembagaan, Efektifitas Organisasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ASN dan PNS, Manajemen Pemerintahan yang Simple dan Praktis, Penguatan Kemandirian masyarakat dan Swasta dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang Modern (Good Governance).

B. MAKSUD

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat yaitu merupakan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di susun dalam rencana kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2024. Pemerintah telah menerapkan suatu sistem Pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja secara terpadu dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

C. TUJUAN

Laporan Kinerja Tahunan yang di buat oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat Tahun 2023 ini adalah wujud pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran dengan tujuan agar menjadi bahan yang dapat digunakan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat dan Pimpinan OPD terkait sebagai Bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Visi dan Misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditunjukan untuk memberikan gambaran tentang :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat.
2. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sebagai bahan peningkatan dan motivasi kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Papua Barat dimasa yang akan datang.

D. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
 4. Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4842).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

E. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat maka tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan Unsur Staf yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Sekretariat Daerah dan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi interen maupun antar unit kerja lainnya sesuai Tupoksi masing-masing.

F. TUGAS DAN FUNGSI.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyusun rancangan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas administratif sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Provinsi Papua Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Mempunyai fungsi : **Menyusun Rencana, Program, dan melaksanakan Kegiatan, Mengkoordinasikan, Mengevaluasi dan Pelaporan serta Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama.**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan
- b. Mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
- c. Memfasilitasi Penyelesaian konflik batas wilayah antar Distrik, kabupaten/kota dan antar Provinsi;
- d. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Koordinasi dan Fasilitas Pemilihan Kepala Daerah;
- f. Koordinasi dan fasilitas Tim Perencana, Tim Persiapan dan Tim pelaksana serta Sekretariat Pengadaan Tanah;
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan Administrasi

tugas-tugas di bidang pemerintahan, Otonomi daerah, Kerja Sama;

- h. Merencanakan, menkoordinasikan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas-tugas di pemerintahan, otonomi daerah, Kerja Sama.
- i. Menyelenggarakan Penata Usahaan data dan informasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kerja Sama.
- j. Melaksanakan pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi tugas bawahan agar berjalan secara maksimal.
- k. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier diantaranya Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian DP3.
- m. Memberi pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan.
- n. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

G. STRUKTUR ORGANISASI.

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat telah memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 39 Tahun 2016 tanggal 30 Desember Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Adapun Struktur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat sebagai berikut :

1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Kepala Bagian Pemerintahan membawahi 3 sub bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Sub Bagian Pemerintahan
 - c. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Kewilayahan
3. Kepala Bagian Otonomi Daerah membawahi 3 Sub Bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - c. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
4. Kepala Bagian Kerja Sama membawahi 3 Sub Bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
 - b. Kepala Sub Bagian Kerja Sama Antar Pemerintah
 - c. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

H. SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur/pegawai yang berada di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan.

Tabel 1

Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Eselon dilingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat

NO	JABATAN		ESELON			JUMLAH
			II.a	III.a	IV.a	
1.	Kepala Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah		1	-	-	1
2.	Kepala Bagian Pemerintahan		1	-	-	1
	2.1	Kasubag Pemerintahan Umum	-	-	1	1
	2.2	Kasubag Administarsi Pemerintahan & Fasilitas Penataan Wilayah	-	-	1	1
	2.3	Kasubag Tata Usaha	-	-	1	1
3.	Kepala Bagian Otonomi Daerah		-	1	-	1
	3.1	Kasubag Evaluasi & Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	1	1
	3.2	Kasubag Pengembangan Otonomi Daerah & Penataan Urusan	-	-	1	1
4.	3.3	Kasubag Administrasi kepala Daerah & DPRD	-	-	1	1
	Kepala Bagian kerjasama		-	1	-	1
	4.1	Kasubag kerja Sama Antar Pemerintah	-	-	1	1
	4.2	Kasubag kerja Sama Badan Usaha / Swasta	-		1-	1
	4.3	Kasubag Evaluasi Pelaksanaan kerja Sama			1	1

NO	JABATAN		ESELON			JUMLAH
			II.a	III.a	IV.a	
		Jumlah	1	3	9	13

Tabel. 2

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat

NO	MENURUT PANGKAT	MENURUT GOLONGAN																JUMLAH
		I				II				III				IV				
		a	b	C	d	A	B	c	d	a	b	c	D	a	b	C	d	
1	Pembina Utama Muda																1	1
2	Pembina Tk. I											1			2			-
3	Pembina													2				4
4	Penata Tk. I										1		6					8
5	Penata																	7
6	Penata Muda Tk.I										1							1
7	Penata Muda									10								10
8	Pengatur Tk.I								5									5
9	Pengatur							-										-
10	Pengatur Muda Tk.I						1											1
11	Pengatur Muda					-												-
Jumlah		-	-	-	-	-	1	-	5	10	1	7	8	4	-	1	-	37

Tabel. 3

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Diklat Struktural dilingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat

No	Jabatan	DIKLAT STRUKTURAL				
		PIM.I	PIM. II	PIM.III	PIM. IV	KET
1.	Kepala Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah		√	√	√	
2.	Kepala Bagian Pemerintahan					
	2.1 Kasubag Pemerintahan Umum				√	
	2.2 Kasubag Administrasi Pemerintahan & Fasilitasi Penataan Wilayah				√	
	2.3 Kasubag Tata Usaha				√	
3.	Kepala Bagian Otonomi daerah			√	√	
	3.1 Kasubag Evaluasi & penyelenggaraan Pemerintahan				√	
	3.2 Kasubag Pengembangan Otonomi Daerah & Penataan Urusan				√	
	3.3 Kasubag Administrasi kepala Daerah & DPRD				√	
4	Kepala Bagian kerja Sama					
	4.1 Kasubag kerja Sama Antar Pemerintah			√	√	
	4.2 Kasubag kerja Sama Badan Usaha / Swasta				√	
	4.3 Kasubag Evaluasi Pelaksanaan kerja Sama				√	

Tabel. 4

Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Klamín dilingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat

NO	Tingkat Pendidikan	JENIS KLAMIN		JUMLAH
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1.	Doktor (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	4	1	6
3.	Sarjana (S1)	17	7	23
4.	Diploma 3 (D3)	1	1	2
5.	SLTA	3	1	4
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
	Jumlah	25	10	35

Tabel.5

Daftar Nama Pegawai PNS dilingkungan Struktural Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1	OKTOFIANUS MAYOR, S.Sos NIP. 19650602 199003 1 015	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Aktif
2	JOHN HARRISON KOIREWOA, S.Sos NIP. 19730625 199301 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Aktif
3	TEZZAR B. RUMBKWAN, S.STP NIP. 19831201 200212 1 001	Kepala Bagian Otonomi Daerah	Aktif
4	MANUEL.W.Y.WANGGAI,SE,MM NIP.19721223 200904 1002	Kepala Bagian Kerja Sama	Aktif
5	YANTI RUMAHTORA, S.IP, M.Si NIP. 19790829 199810 2 001	Kasubbag Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Aktif
6	SIBRANDUS A.A.MURAY,S.IP NIP.19770808 200801 1 021	Kasubbag Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Aktif
7	MAMEI ZADRAK SAIBA, S.IP NIP. 19800418 201004 1 001	Kasubbag Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	Aktif
8	HENRIKO F.H.L. TOBING, S.E., M.Si NIP. 19730728 200804 1 001	Kasubbag Pemerintahan Umum	Aktif
9	MARTINUS WONGGOR, S.IP NIP.19790525 201104 1 001	Kasubbag Tata Usaha	Aktif
10	PETRUS WARMASEN, A.Md., IP NIP.19780824 200904 1 003	Kasubbag Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Aktif
11	YOSMAN PAKILARAN,ST NIP.19761226 200605 1 001	Kasubbag Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Aktif
12	MELIANUS AJOI, SE, M.Si NIP. 19780519 200701 1 011	Kasubbag Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Aktif
13	MARTHEN MANDACAN. S.IP	Kasubbag Kerja Sama Antar	Aktif

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
	NIP.19870322 201004 1 001	Pemerintah	
14	INTRA JETZIANA ISMAIL, S.STP NIP.19950717 201708 2 003	Staf	Aktif
15	ELIA WANEY, S.STP NIP. 19930520 201708 1 001	Staf	Aktif
16	LIS RASDIANA SADIPUN, S.Sos NIP.19820823 202011 2 001	Staf	Aktif
17	EDIZON YUMAME, S.Sos NIP.19830426 202011 1 001	Staf	Aktif
18	CESILIA D. ROSARIO SABUBUN, S.IP NIP.19830426 202011 2 001	Staf	Aktif
19	YULISMAN PASERANG, SH NIP.19741112 200701 1 022	Staf	Aktif
20	MARTHINCE SORA NIP.198203 03200412 2 001	Staf	Aktif
21	ISAK TOANSIBA NIP.19700424 200412 1 001	Staf	Aktif
22	YOHANA T.J.RUMBEKWAN NIP.19831118 200701 2 003	Staf	Aktif
23	FERRY PALINGGI NIP.19740409 200701 1 009	Staf	Aktif
24	YORGEN RAUNSAI NIP.19731221 200701 1 016	Staf	Aktif
25	LIDYA ESTER I. WAMBRAUW NIP.19860107 201004 2 001	Staf	Aktif
26	PENI TINDIGE NIP.19770218 201104 2 001	Staf	Aktif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah (Lakip) 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
27	DOLFINUS DIMARA, S.Sos NIP. 19721212 199503 1 004	Staf	Aktif
28	NATALIA CAROLINE . S. RUMBRUREN, S.STP NIP. 1984011022 200212 2 001	Staf	Aktif
29	YULIANA M. RONSUMBRE, A.MD NIP. 19870123 201412 2 001	Staf	Aktif
30	KORINUS BASNA, S.IP NIP. 19831009 202011 1 001	Staf	Aktif
31	ICHLAZUL AMALSUAERY NIP. 20000614 202208 1 002	Staf	Aktif
32	ANDREW MAYOR, S.STP NIP. 19930209 201609 1 002	Staf	Aktif
33	JEFRI AYEMI NIP. 19880327 202011 1 001	Staf	Aktif
34	PETRONELA KARATH, SH NIP. 19720101 200605 2 001	Staf	Aktif
35	IRWANTO PULUNG NIP. 19890418 202011 1 001	Staf	Aktif
36	MARTHEN SESA, S.E	Staf PPPK	Aktif
37	LEONARD SORBU	Staf PPPK	Aktif
38	PETRUS SAHERTIAN.A.Md.S.Sos	Staf PPPK	Aktif
39	JEKSON SIBARANI.SE	Staf PPPK	Aktif
40	MARLYN S TOULE, S.IP	Staf PPPK	Aktif
41	YEFTA JITMAU	Staf PPPK	Aktif
42	ELIMAS DOWANSIBA	Staf PPPK	Aktif

Tabel.6

Daftar Nama Pegawai Honorer di Lingkungan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	RUDOLF R. HUKOM, S.E	STAF HONORER	Aktif
2	VIRA IRMAYANI MANDACAN, S.E	STAF HONORER	Aktif
3	KENNY R.F. PADWA	STAF HONORER	Aktif
4	ISNA MANGLO BARANI, S.S	STAF HONORER	Aktif
5	MARTHEN MANSIM	STAF HONORER	Aktif
6	ORTIZAN MANDACAN	STAF HONORER	Aktif
7	RISTIN LORENSIA LUNGAN, S.E	STAF HONORER	Aktif
8	OKTOVINA MARAN	STAF HONORER	Aktif
9	ARNOLD F.S. ORAIN, S.H	STAF HONORER	Aktif
10	AYUB ELIA IMBENAI	STAF HONORER	Aktif
11	FERDINANDA A. MIRINO, S.E	STAF HONORER	Aktif
12	YULIANUS AYEMI	STAF HONORER	Aktif
13	MARIANA THANIA AMBUN, S.IP	STAF HONORER	Aktif
14	YUNUS RICHARD KBAREK	STAF HONORER	Aktif

NO	NAMA	JABATAN	KET
15	DELI DELILA MANDACAN	STAF HONORER	Aktif
16	OKTOVIANUS TOWANSIBA	STAF HONORER	Aktif
17	FRENGKI GERRY SAROY	STAF HONORER	Aktif
18	ADRIANA SENGO, S.Tr.P	STAF HONORER	Aktif
19	MONICA	STAF HONORER	Aktif

I. SARANA DAN PRASARANA.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut Terlampir

Tabel .7

Keadaan Sarana Prasarana tahun 2024

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat

NO	URAIAN		SATUAN	VOLUME	KET
A	KENDARAAN DINAS				
	1	Kendaraan Roda Empat (4)	Unit	3	Baik
	2	Kendaraan Roda Dua (2)	Unit	18	Baik
B	INVENTARIS BARANG				Baik
	1	Meja Satu Biro (Kepala Biro)	Buah	1	Baik
	2	Meja ½ Biro (Kepala Bagian)	Buah	3	Baik
	3	Meja Kasubag	Buah	8	Baik
	4	Meja Staf	Buah	36	Baik
	5	Kursi Staf	Buah	36	Baik
	6	Kursi Roda	Buah	12	Baik
	7	Lemari	Buah	44	Baik
	8	Komputer	Unit	51	Baik
	9	Mesin Printer	Unit	51	- 5 Baik - 2 Rusak
	10	Mesin Penhancur Kertas	Buah	4	Baik
	11	Mesin Foto Copy	Buah	4	Baik
	12	Kulkas	Buah	4	Baik
	13	Dispenser	Buah	4	Baik
	14	Ac	Unit	16	Baik
	15	Brankas	Buah	1	Baik

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026, di dalamnya tercantum Visi dan MISI Provinsi yaitu **Visi Membangun Provinsi Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat** dengan **Misi**

1. **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance) serta otonomi khusus yang efektif**
2. **Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**
3. **Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan,**
4. **Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar**
5. **Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata,**
6. **Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat,**
7. **Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak berbasis masyarakat ketahanan sosial,**
8. **Memperkuat kerukunan umat bergama dan kondusivitas daerah.**

Dalam Visi dan Misi Provinsi Papua Barat tersebut yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Visi **Aman – Sejahtera – Bermartabat** dengan **Misi ke-1** yaitu Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance) serta otonomi khusus yang efektif dan **Misi ke 2.** Mewujudkan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

I. VISI “ Menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat “

- 1. Aman** : mengarah pada kondisi sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan suku dan agama, guna menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis, sebagai prasyarat utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
- 2. Sejahtera** : mengarah pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan perekonomian masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan lokal, dengan sasaran utama meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 3. Bermartabat** : Mengarah pada kondisi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur adat dan agama dalam tatanan kehidupan.

II. MISI

- 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance) serta otonomi khusus yang efektif.**

Tujuan 2 pada Misi 1 : Meningkatkan Kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintah, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus pada **sasaran** :

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah.

2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan pada Misi 2 : **Meningkatnya** pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan pada **sasaran 3 : Meningkatkan** koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertahanan wilayah dan penataan wilayah lingkup provinsi papua barat.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

a. Strategi

Strategi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif. Yang merupakan langkah atau upaya untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai :

- Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Menyampaikan LKPJ dan LPPD tepat waktu
- Meningkatkan Skor EKPPD terhadap LPPD Provinsi Papua Barat
- Meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Menyelesaikan konflik penyelenggaraan pemerintahan
- penatan batas wilayah dan pemekaran
- pembinaan terhadap distrik, kelurahan dan kampung

Strategi Misi 2 : Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Yang merupakan langkah atau upaya untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai :

- Menyelesaikan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana umum.
- Menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi.

b. Kebijakan

kebijakan biro pemerintah merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kebijakan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat sebagaimana berikut :

- Kebijakan pada Misi 1 : menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta otonomi Khusus yang efektif.
- Menciptakan administrasi perkantoran yang efektif
 - Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
 - Meningkatkan disiplin aparatur
 - Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
 - Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Menyusun dan menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu
 - Meningkatkan kapasitas LPPD provinsi Papua Barat
 - Meningkatkan kapasitas LPPD Kabupaten/Kota

- Melaksanakan Raker bupati dan walikota se provinsi papua barat
- Rapat koordinasi bagian pemerintahan/otda se provinsi papua barat
- Menyelesaikan administrasi DPRD dan KDH
- Forum Koordinasi Unsur Pimpinan Daerah
- Penyelesaian Konflik Pemerintahan antar kabupaten dan kota
- Penyelesaian penegasan batas daerah kabupaten dan kota
- Evaluasi dan pembinaan terhadap Daerah Otonom Baru(DOB)
- Pendataan Aparatur distrik, kelurahan dan kampung
- Melaksanakan rapat koordinasi bagian pemerintahan kampung se provinsi papua barat
- Melakukan asistensi lapangan dan verifikasi data pembentukan distrik, kelurahan dan kampung persiapan
- Pemuktahiran dan validasi data administrasi pemerintahan distrik, kelurahan dan kampung
- Monitoring dan evaluasi distrik, kelurahan dan kampung menuju definitif

Kebijakan Misi 2

: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang merupakan kebijakan Misi ke 2 adalah :

- Menyelesaikan Konflik Pertanahan
- Membayar ganti rugi tanah

4. TUJUAN

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagai salah satu Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi dengan tujuan :

- a). meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik.
- b). Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah.

5. SASARAN STRATEGIS

Dari Tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka untuk mencapai Tujuan tersebut Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah menjabarkan sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

- a) Optimalisasi Pelayanan Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah
 - 1). Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2). Menyampaikan LKPJ dan LPPD tepat waktu
 - 3). Meningkatkan skor EKKPD terhadap LPPD Provinsi Papua Barat
 - 4). Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 5). Menyelesaikan konflik penyelenggaraan pemerintahan
 - 6). Penataan Batas wilayah dan pemekaran
 - 7). Pembinaan terhadap distrik, kelurahan dan kampung

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024.

1. PROGRAM.

Program Pemerintahan dan Otonomi ;

Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Indicator sub kegiatan

- Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- Fasilitasi Penataan Wilayah

Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Indicator sub kegiatan:

- Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
- Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Indicator sub kegiatan :

- Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah
- Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Indicator sub kegiatan :
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Program dan Kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat, maka penetapan kinerja tahun 2024 ditetapkan sebagai penilaian kinerja yang akan dicapai dan untuk terlaksananya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

program, kegiatan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024,

Untuk mengetahui Penetapan Kinerja dapat dilihat pada tabel 10
Sebagai berikut:

Tabel 8
RINGKASAN RENCANA KERJA 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Bagian Penanggung Jawab
	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		8.000.000.000	DBH Provinsi	
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	1.050.000.000		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	200.000.000		Bagian Pemerintahan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	200.000.000	DBH Provinsi	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	600.000.000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	300.000.000	DBH Provinsi	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 Orang	300.000.000	DBH Provinsi	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	250.000.000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	250.000.000	DBH Provinsi	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100%	6.950.000.000	DBH Provinsi	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100%	1.950.000.000		Bagian Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	300.000.000	DBH Provinsi	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	900.000.000	DBH Provinsi	
Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	750.000.000	DBH Provinsi	
Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	3.000.000.000		Bagian Otonomi Daerah
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	1.000.000.000	DBH Provinsi	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	1 Dokumen	1.500.000.000	DBH Provinsi	
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	500.000.000	DBH Provinsi	
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	2.000.000.000		Bagian Kerja Sama
Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	2 Dokumen	700.000.000	DBH Provinsi	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Badan Usaha/ Swasta	4 Dokumen	700.000.000	DBH Provinsi	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	600.000.000	DBH Provinsi	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang dituangkan dalam bentuk Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada : Masukan (Inputs), Proses (Process), Keluaran (Outputs) dan Hasil (Outcomes) sedangkan satuan pengukuran tiap-tiap Indikator ditetapkan berupa : Orang, Rupiah, Buah, Unit, Hari, Paket dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

I. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Sasaran Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah maka untuk mencapai hasil Capaian Indikator Kinerja Utama secara menyeluruh melalui penghitungan dan Pengukuran Indikator Kinerja, mulai dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan sampai pada tahap hasil atau pengfungsian hasil pekerjaan. Kinerja Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 9

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

SESUAI RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023-2026

No.	Sasaran	indikator	Satuan	Formula perhitungan	Perangkat daerah	Sumber data
1	Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua Barat	Gubernur dan Wakil Gubernur yang memadai		memadai dibagi Jumlah sarana prasarana rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur dikalikan 100%	Biro pemerintahan	Biro pemerintahan
		Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat	persen	Luas batas wilayah Provinsi Papua Barat yang disepakati dibagi luas batas wilayah Provinsi Papua Barat yang seharusnya disepakati dikalikan 100%		
		Cakupan penyepakatan batas wilayah antar-kabupaten/kota	Persen	Luas batas wilayah antar-kabupaten/kota yang disepakati di bagi luas batas wilayah antar-Kabupaten/Kota yang seharusnya disepakati dikalikan 100%	Biro pemerintahan	Biro pemerintahan
		Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat (%)	persen	Luas batas wilayah Hak Ulayat yang disepakati dibagi luas batas wilayah hak ulayat yang seharusnya disepakati dikalikan 100%		
	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Sekretariat Daerah	Tingkat kinerja pelaksanaan program dalam mendukung capaian sasaran Sekretariat Daerah		Jumlah indikator kinerja sekretariat daerah yang mencapai target dibagi total indikator kinerja dikalikan 100%	Semua Biro	Semua Biro

Ringkasan indikator kinerja utama (IKU)

yang umumnya relevan untuk Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di tingkat provinsi, yang dapat disesuaikan dengan konteks spesifik Provinsi Papua Barat untuk tahun 2024:

Bagian Pemerintahan Umum:

- **Persentase kebijakan daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.**
 - Mengukur kesesuaian produk hukum daerah dengan peraturan nasional.
 - Menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan.
- **Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan daerah.**
 - Mengukur keterlibatan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
 - Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas.
- **Persentase penyelesaian sengketa batas wilayah antar daerah.**
 - Mengukur efektivitas penyelesaian konflik wilayah.
 - Menunjukkan stabilitas dan ketertiban administrasi.
- **Persentase desa/kelurahan yang telah memiliki profil desa/kelurahan yang mutakhir.**
 - Mengukur tingkat akurasi dan pembaruan data wilayah tingkat dasar.
 - Menunjukkan kualitas data untuk perencanaan pembangunan.

Bagian Otonomi Daerah:

- **Indeks kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKPPD).**
 - Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek otonomi.
 - Menunjukkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.
- **Persentase dana transfer daerah yang tersalurkan tepat waktu.**
 - Mengukur efisiensi penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah.
 - Menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan program daerah.
- **Jumlah peraturan daerah tentang pembentukan dan penataan daerah otonom baru (DOB).**
 - Mengukur kemajuan dalam proses pemekaran daerah, jika relevan.
 - Menunjukkan respons terhadap aspirasi masyarakat.
- **Persentase laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).**
 - Mengukur akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
 - Menunjukkan tata kelola keuangan yang baik.

Bagian Kerjasama Daerah:

- **Jumlah perjanjian kerjasama antar daerah yang terlaksana.**
 - Mengukur intensitas dan efektivitas kerjasama antar daerah.
 - Menunjukkan sinergi dalam pembangunan regional.
- **Nilai investasi yang dihasilkan dari kerjasama daerah.**

- Mengukur dampak ekonomi dari kerjasama antar daerah.
- Menunjukkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

A. Program dan Kegiatan

Dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan pada bab sebelumnya, kemudian dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan berdasarkan strategi dan arah kebijakan Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah yang merupakan penajaman dari strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sementara Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Adapun matriks program dan kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif masing - masing kegiatan pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah disajikan dalam Lampiran.

B. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

indikator kinerja Provinsi Papua Barat terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Berbagai indikator yang tercantum tersebut, indikator yang tidak hanya indikator pada level sasaran, namun memuat juga indikator level program. Untuk itu, pada tataran OPD perlu mengidentifikasi indikator berbagai level tersebut agar adanya konsistensi antar-indikator, sehingga efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat terwujud.

Berdasarkan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, tujuan, sasaran, dan penetapan indikator kinerja Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka indikator kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah disajikan Indikator kinerja yang disajikan hanya indikator kinerja yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dapat memberikan gambaran kontribusi langsung Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2023-2026.

Dengan demikian, indikator yang lebih spesifik dan khas Perangkat Daerah namun tidak dimuat dalam RPJMD tidak disajikan namun tetap menjadi bagian dari tolok ukur dan penilaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

TABEL10

Tabel T-C.27 Biro Pemerintahan
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Provinsi Papua Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan PEMDA dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x1000)								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2029		Lokasi										
							2025		2026		2027		2028		Target												
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Fasilitasi Kerja sama daerah, otonomi daerah dan kerjasama daerah.	Capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan kerjasama daerah.	4	01	03		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan kerjasama daerah	100	Persen	100	Persen	5.785	100	Persen	5.946	100	Persen	6.112	100	Persen	6.283	100	Persen	24.127		
			4	01	03	1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	calupun pelaksanaan tugas pemerintahan	100	Persen	100	Persen	2.262	100	Persen	2.304	100	Persen	2.349	100	Persen	2.394	100	Persen	9.309		
			4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3	Dokumen	3	Dokumen	959	3	Dokumen	972	3	Dokumen	980	3	Dokumen	989	3	Dokumen	3.900	Manokwari dan Kabupaten/Kota
			4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2	Dokumen	2	Dokumen	593	2	Dokumen	610	2	Dokumen	628	2	Dokumen	648	2	Dokumen	2.479	Manokwari
			4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1	Dokumen	2	Dokumen	710	2	Dokumen	722	2	Dokumen	740	2	Dokumen	758	2	Dokumen	2.930	Manokwari dan Kabupaten/Kota
			4	01	03	1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Calapun Pelaksanaan otonomi daerah	100	Persen	100	Persen	1.771	100	Persen	1.864	100	Persen	1.927	100	Persen	1.996	100	Persen	7.558		
			4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1	Dokumen	1	Dokumen	549	3	Dokumen	560	1	Dokumen	573	1	Dokumen	585	1	Dokumen	2.247	Manokwari dan Kabupaten/Kota
			4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1	Dokumen	1	Dokumen	460	1	Dokumen	477	1	Dokumen	485	1	Dokumen	516	1	Dokumen	1.948	Manokwari dan Kabupaten/Kota
			4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2	Laporan	2	Laporan	762	2	Laporan	827	2	Laporan	860	2	Laporan	915	2	Laporan	3.364	Manokwari dan Kabupaten/Kota
			4	01	03	1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Calapun pelaksanaan fasilitasi kerja sama	100	Persen	100	Persen	1.732	100	Persen	1.778	100	Persen	1.836	100	Persen	1.893	100	Persen	7.259		
			4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2	Dokumen	3	Dokumen	630	3	Dokumen	640	3	Dokumen	662	3	Dokumen	681	3	Dokumen	2.613	Manokwari dan Kabupaten/Kota
			4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	2	Dokumen	2	Dokumen	536	2	Dokumen	544	2	Dokumen	562	2	Dokumen	581	2	Dokumen	2.223	Manokwari dan Kabupaten/Kota
			4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2	Laporan	2	Laporan	586	2	Laporan	594	2	Laporan	612	2	Laporan	631	2	Laporan	2.423	Manokwari dan Kabupaten/Kota

TABEL.11

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				5.946				6.112	
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persen	100%	2.304			100%	2.349	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		100%	972	Dana Umum - Pendapatan Asli Daerah		3	980	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Manokwari dan Kabupaten/ Kota	100%	610	Dana Umum - Pendapatan		2	628	Biro Pemerintahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

						Pelaksanaan Pemerintahan Umum				Asli Daerah				dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Manokwari dan Kabupaten/ Kota	100%	722	Dana Umum - Pendapatan Asli Daerah		2	740	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah			100%	1.864			100%	1.927	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Manokwari dan Kabupaten/ Kota	100%	560	Dana Umum - Pendapatan Asli Daerah		1	573	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Manokwari dan Kabupaten/ Kota	100%	477	Dana Alokasi Umum-PAD		1	495	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.02	03	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Manokwari dan Kabupaten/ Kota	100%	827	Dana Umum - Pendapatan Asli Daerah		2	860	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.03		Pelaksanaan Kerja Sama Daerah			100%	1.778			100%	1.836	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Manokwari dan Kabupaten/ Kota	100%	640	Dana Umum - Pendapatan Asli Daerah		3	662	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Badan Usaha/ Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Manokwari dan Kabupaten/ Kota	100%	544	Dana Umum - Pendapatan Asli Daerah		2	562	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Manokwari dan Kabupaten/ Kota	100%	594	Dana Umum - Pendapatan Asli Daerah		2	612	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Alokasi Anggaran pada DPA-OPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Papua Barat Tahun 2024 berjumlah Rp. 7.855.396.062,00 (Tuju milyar delapan ratus limapuluh lima juta tigaratus sembilan puluh enam ratus enampuluh dua rupiah) .

Tabel.12

Tabel Rencana Anggaran Tahun 2024

4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						Rp7.855.396.062,00	Rp94.327.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.949.723.728,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp7.855.396.062,00	Rp94.327.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.949.723.728,00	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH	Rp7.855.396.062,00	Rp94.327.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.949.723.728,00	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp129.999.818,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.999.818,00	
4	1	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp129.999.818,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.999.818,00	
4	1	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp129.999.818,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.999.818,00	
					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa						
4	1	3			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp7.725.396.244,00	Rp94.327.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.819.723.910,00	
4	1	3	01.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rp2.186.392.947,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.186.392.947,00	
4	1	3	01.01	1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Rp1.308.616.158,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp1.308.616.158,00	
					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa						
4	1	3	01.01	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp438.888.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp438.888.289,00	
					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa						
4	1	3	01.01	3	Fasilitasi Penataan Wilayah	Rp438.888.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp438.888.500,00	
					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa						
4	1	3	01.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp4.275.917.497,00	Rp40.747.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.316.664.997,00	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

4	1	3	01.02	1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.420.888.524,00	Rp17.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.438.887.524,00	
4	1	3	01.02	2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.416.140.086,00	Rp22.748.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.438.888.586,00	
4	1	3	01.02	3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp438.888.887,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp438.888.887,00	
4	1	3	01.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Rp1.263.085.800,00	Rp53.580.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.316.665.966,00	
4	1	3	01.03	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp449.999.735,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.999.735,00	
4	1	3	01.03	2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp453.833.600,00	Rp12.832.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp466.666.266,00	
4	1	3	01.03	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp359.252.465,00	Rp40.747.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.999.965,00	

TABEL
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kode Rekening	Nama Rekening	Tanggal Dokumen	Keterangan Dokumen	Nilai Realisasi	Periode SPD	Nilai SPD	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Tanggal Transfer	Nilai SP2D
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5 Desember 2024	PEMBAYARAN LEMBUR PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.184.000,00	Semester 2	10.192.000,00	92.00/04.0/000942/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	9 Desember 2024	10 Desember 2024	10.188.000,00
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5 Desember 2024	PEMBAYARAN LEMBUR PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.000,00	Semester 1	2.600.000,00	92.00/04.0/000942/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	9 Desember 2024	10 Desember 2024	10.188.000,00
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5 Desember 2024	HONORARIUM KEGIATAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	11.700.000,00	Semester 2	11.700.000,00	92.00/04.0/000939/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	9 Desember 2024	10 Desember 2024	13.650.000,00
4	PROGRAM PEMERINTA	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium	5 Desember	HONORARIUM KEGIATAN PEMBUATAN LAPORAN	1.950.000,00	Semester 1	11.700.000,00	92.00/04.0/000939	9 Desember	10 Desember	13.650.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	HAN DAN OTONOMI DAERAH		Pemerintahan		Pemerintahan	02	m Pengadaa n Barang/Ja sa	2024	KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				/LS/4.01.000.000.01.0000/PR/12/2024	er 2024	mber 2024	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5 Desember 2024	PEMBAYARAN LEMBUR PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	24.293.334,00	Semester 2	24.293.334,00	92.00/04.0/000940/LS/4.01.000.000.01.0000/PR/12/2024	9 Desember 2024	10 Desember 2024	36.440.000,00
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5 Desember 2024	PEMBAYARAN LEMBUR PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	12.146.666,00	Semester 1	12.146.666,00	92.00/04.0/000940/LS/4.01.000.000.01.0000/PR/12/2024	9 Desember 2024	10 Desember 2024	36.440.000,00
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5 Desember 2024	PEMBAYARAN LEMBUR PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	8.490.000,00	Semester 2	8.500.000,00	92.00/04.0/000941/LS/4.01.000.000.01.0000/PR/12/2024	9 Desember 2024	10 Desember 2024	8.490.000,00
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Dis	12 Desember 2024	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PEKERJAAN PENGADAAN PEMBANGUNAN KANTOR DISTRIK FAKFAK TENGAH	925.807.000,00	Semester 1	1.767.450.000,00	92.00/04.0/000985/LS/4.01.000.000.00.00.00.	13 Desember 2024	20 Desember 2024	925.807.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	DAERAH						erahkan kepada Pihak Ketiga/Pi hak Lain		TAHAP 2 PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAN PENATAAN URUSAN				01.0000/ PR/12/20 24			
9	PROGRAM PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	5.1.02.0 2.08.00 18	Belanja Jasa Konsultan si Pengawas an Arsitektur	13 Desember 2024	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR DISTRIK FAKFAK TENGAH TAHAP 2 PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAN PENATAAN URUSAN	73.215.00 0,00	Semester 1	142.000.0 00,00	92.00/04. 0/001035 /LS/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/12/20 24	17 Desemb er 2024	18 Dese mber 2024	73.215. 000,00
10	PROGRAM PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1. 03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.0 2.01.00 71	Belanja Lembur	13 Desember 2024	PEMBAYARAN KERJA LEMBUR PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	42.990.00 1,00	Semester 2	43.000.00 1,00	92.00/04. 0/001027 /LS/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/12/20 24	16 Desemb er 2024	20 Dese mber 2024	85.990. 000,00
11	PROGRAM PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1. 03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.0 2.01.00 71	Belanja Lembur	13 Desember 2024	PEMBAYARAN KERJA LEMBUR PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	42.999.99 9,00	Semester 1	42.999.99 9,00	92.00/04. 0/001027 /LS/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/12/20 24	16 Desemb er 2024	20 Dese mber 2024	85.990. 000,00
12	PROGRAM PEMERINTAH DAN OTONOMI	4.01.03. 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1. 03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5.1.02.0 2.01.00 71	Belanja Lembur	13 Desember 2024	PEMBAYARAN LEMBUR PADA SUB KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BIRO PEMERINTAHAN	24.741.00 0,00	Semester 2	24.750.00 0,00	92.00/04. 0/001029 /LS/4.01. 0.00.0.00.	16 Desemb er 2024	17 Dese mber 2024	24.751. 000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	DAERAH								DAN OTONOMI DAERAH				01.0000/ PR/12/20 24			
13	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1. 03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5.1.02.0 2.01.00 71	Belanja Lembur	13 Desember 2024	PEMBAYARAN LEMBUR PADA SUB KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	10.000,00	Semester 1	24.750.00 0,00	92.00/04. 0/001029 /LS/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/12/20 24	16 Desemb er 2024	17 Dese mber 2024	24.751. 000,00
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.01.01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.1. 02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.1.02.0 4.01.00 01	Belanja Perjalana n Dinas Biasa	4 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	49.781.29 6,00	Semester 2	49.784.00 0,00	92.00/04. 0/000751 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ P4/10/20 24	16 Oktober 2024	16 Okto ber 2024	50.955. 460,00
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.01.01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.1. 02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.1.02.0 4.01.00 01	Belanja Perjalana n Dinas Biasa	4 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.171.460, 00	Semester 1	49.784.00 0,00	92.00/04. 0/000751 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ P4/10/20 24	16 Oktober 2024	16 Okto ber 2024	50.955. 460,00
16	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1. 03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.0 2.01.00 71	Belanja Lembur	4 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	28.350.00 0,00	Semester 1	28.350.00 0,00	92.00/04. 0/000605 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ P3/8/202	22 Agustus 2024	22 Agust us 2024	453.83 3.600,0 0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

													4			
17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	28.350.000,00	Semester 2	28.350.000,00	92.00/04.0/000605/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.833.600,00
18	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	82.016.000,00	Semester 1	82.025.000,00	92.00/04.0/000605/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.833.600,00
19	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	21.036.600,00	Semester 1	21.036.600,00	92.00/04.0/000605/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.833.600,00
20	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	200.224.200,00	Semester 1	200.256.000,00	92.00/04.0/000605/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.833.600,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

21	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	92.346.000,00	Semester 1	93.816.000,00	92.00/04.0/000605/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.833.600,00
22	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	31.260.000,00	Semester 2	31.265.000,00	92.00/04.0/000837/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	22 November 2024	25 Nove mber 2024	313.707.000,00
23	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	277.092.347,00	Semester 2	277.162.000,00	92.00/04.0/000837/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	22 November 2024	25 Nove mber 2024	313.707.000,00
24	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	31.853,00	Semester 1	58.942.000,00	92.00/04.0/000837/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	22 November 2024	25 Nove mber 2024	313.707.000,00
25	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5.1.02.02.04.00	Belanja Sewa	20 Desember	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI	800.000,00	Semester 2	800.000,00	92.00/04.0/000837	22 November	25 Nove	313.707.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	HAN DAN OTONOMI DAERAH		Pemerintahan			36	Kendaraan Bermotor Penumpang	2024	PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM				/TU/4.01.000.0.00.01.0000/PR/11/2024	ber 2024	mber 2024	0
26	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	4.480.000,00	Semester 2	4.480.000,00	92.00/04.0/000837/TU/4.01.000.0.00.01.0000/PR/11/2024	22 November 2024	25 Nove mber 2024	313.707.000,00
27	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	190.666.800,00	Semester 1	660.420.000,00	92.00/04.0/000755/TU/4.01.000.0.00.01.0000/P4/10/2024	17 Oktober 2024	18 Okto ber 2024	326.078.000,00
28	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	135.392.800,00	Semester 2	135.552.000,00	92.00/04.0/000755/TU/4.01.000.0.00.01.0000/P4/10/2024	17 Oktober 2024	18 Okto ber 2024	326.078.000,00
29	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.052.01.00	Belanja Makanan dan Minuman	24 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	46.500.000,00	Semester 1	107.300.000,00	92.00/04.0/000520/TU/4.01.000.0.00.00.00.00	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.753.345,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	DAERAH						Rapat						01.0000/ M/7/202 4			
30	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.0 2.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	6.300.000, 00	Semester 1	12.300.00 0,00	92.00/04. 0/000520 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ M/7/202 4	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.75 3.345,0 0
31	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.0 4.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	94.684.00 0,00	Semester 1	124.708.0 00,00	92.00/04. 0/000520 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ M/7/202 4	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.75 3.345,0 0
32	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.0 4.01.00 04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	47.400.00 0,00	Semester 1	67.500.00 0,00	92.00/04. 0/000520 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ M/7/202 4	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.75 3.345,0 0
33	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.0 2.01.00	Honorarium Tim	24 Desember	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI	95.000.00 0,00	Semester 1	110.000.0 00,00	92.00/04. 0/000520	26 Juli 2024	26 Juli	290.75 3.345,0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	HAN DAN OTONOMI DAERAH		Daerah		Pemerintahan	04	Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2024	DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024		2024	0
34	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	24 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	444.125,00	Semester 2	444.125,00	92.00/04.0/000520/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.753.345,00
35	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	24 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	70.617.550,00	Semester 2	70.618.000,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00
36	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	4.479.303,00	Semester 2	4.479.617,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00
37	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	24 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	4.840.000,00	Semester 2	5.000.000,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	HAN DAN OTONOMI DAERAH		Daerah			03	n Dinas Dalam Kota	2024	KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH				/TU/4.01.00.00.00.01.0000/P4/9/2024	ber 2024	mber 2024	0
38	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	20.500.000,00	Semester 2	20.616.666,00	92.00/04.00/000692/TU/4.01.00.00.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00
39	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	11.850.000,00	Semester 2	19.850.000,00	92.00/04.00/000836/TU/4.01.00.00.00.01.0000/PR/11/2024	20 November 2024	21 November 2024	1.001.023.706,00
40	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	349.409.100,00	Semester 2	530.046.000,00	92.00/04.00/000836/TU/4.01.00.00.00.01.0000/PR/11/2024	20 November 2024	21 November 2024	1.001.023.706,00
41	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung	31 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	20.000.000,00	Semester 2	40.000.000,00	92.00/04.00/000836/TU/4.01.00.00.00.00.00.00.	20 November 2024	21 November 2024	1.001.023.706,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	DAERAH						Kantor						01.0000/ PR/11/20 24			
42	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.0 1.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	31 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	5.113.706, 00	Semester 2	7.059.260, 00	92.00/04. 0/000836 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/11/20 24	20 Novem ber 2024	21 Nove mber 2024	1.001.0 23.706, 00
43	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.0 1.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	137.820.0 00,00	Semester 2	205.680.0 00,00	92.00/04. 0/000836 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/11/20 24	20 Novem ber 2024	21 Nove mber 2024	1.001.0 23.706, 00
44	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.0 2.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	48.800.00 0,00	Semester 2	52.800.00 0,00	92.00/04. 0/000836 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/11/20 24	20 Novem ber 2024	21 Nove mber 2024	1.001.0 23.706, 00
45	PROGRAM PEMERINTAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi	4.01.03.1. 02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan	5.1.02.0 2.01.00	Honorarium Tim	31 Desember	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI	374.500.0 00,00	Semester 2	375.000.0 00,00	92.00/04. 0/000836	20 Novem	21 Nove	1.001.0 23.706,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	HAN DAN OTONOMI DAERAH		Daerah		DPRD	04	Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2024	ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)				/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	ber 2024	mber 2024	00
46	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	31 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	590.000,00	Semester 2	790.000,00	92.00/04.0/000836/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	20 November 2024	21 Nove mber 2024	1.001.023.706,00
47	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	31 Desember 2024	PERTANGGUNGJAWABAN TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	51.300.000,00	Semester 2	70.600.000,00	92.00/04.0/000836/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	20 November 2024	21 Nove mber 2024	1.001.023.706,00
48	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.704,00	Semester 2	49.784.000,00	92.00/04.0/000751/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	16 Oktober 2024	16 Okto ber 2024	50.955.460,00
49	PROGRAM PENUNJANG	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan	4 Desember	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN	0,00	Semester 1	49.784.000,00	92.00/04.0/000751	16 Oktober	16 Okto	50.955.460,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Perangkat Daerah		Keuangan Akhir Tahun SKPD	01	n Dinas Biasa	2024	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD				/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	2024	ber 2024	
50	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	0,00	Semester 1	21.036.600,00	92.00/04.0/000605/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.833.600,00
51	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	1.470.000,00	Semester 1	93.816.000,00	92.00/04.0/000605/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.833.600,00
52	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	31.800,00	Semester 1	200.256.000,00	92.00/04.0/000605/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.833.600,00
53	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman	4 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	9.000,00	Semester 1	82.025.000,00	92.00/04.0/000605/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/8/2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.833.600,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	DAERAH						Rapat						01.0000/ P3/8/202 4			
54	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1. 03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.0 2.01.00 71	Belanja Lembur	4 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	0,00	Semester 2	28.350.00 0,00	92.00/04. 0/000605 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ P3/8/202 4	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.83 3.600,0 0
55	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1. 03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	5.1.02.0 2.01.00 71	Belanja Lembur	4 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA BADAN USAHA/SWASTA	0,00	Semester 1	28.350.00 0,00	92.00/04. 0/000605 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ P3/8/202 4	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	453.83 3.600,0 0
56	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1. 01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5.1.02.0 1.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000,00	Semester 2	31.265.00 0,00	92.00/04. 0/000837 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/11/20 24	22 November 2024	25 November 2024	313.70 7.000,0 0
57	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1. 01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5.1.02.0 4.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	Semester 2	277.162.0 00,00	92.00/04. 0/000837 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/11/20	22 November 2024	25 November 2024	313.70 7.000,0 0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

													24			
58	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	37.800,00	Semester 1	58.942.000,00	92.00/04.0/000837/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	22 November 2024	25 Nove mber 2024	313.707.000,00
59	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraa n Bermotor Penumpa ng	20 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	Semester 2	800.000,00	92.00/04.0/000837/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	22 Novem ber 2024	25 Nove mber 2024	313.707.000,00
60	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	Semester 2	4.480.000,00	92.00/04.0/000837/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	22 Novem ber 2024	25 Nove mber 2024	313.707.000,00
61	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	18.400,00	Semester 1	660.420.000,00	92.00/04.0/000755/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	17 Oktober 2024	18 Okto ber 2024	326.078.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

62	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20 Desember 2024	SETORAN SISA TU SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	0,00	Semester 2	135.552.00,00	92.00/04.0/000755/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	17 Oktober 2024	18 Oktober 2024	326.078.000,00
63	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.02.01.003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	0,00	Semester 1	12.300.000,00	92.00/04.0/000520/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.753.345,00
64	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	124.820,00	Semester 1	124.708.000,00	92.00/04.0/000520/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.753.345,00
65	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.01.01.052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	0,00	Semester 1	107.300.000,00	92.00/04.0/000520/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.753.345,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

													M/7/2024			
66	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	300.000,00	Semester 1	67.500.000,00	92.00/04.0/000520/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.753.345,00
67	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.04.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	0,00	Semester 1	110.000.000,00	92.00/04.0/000520/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.753.345,00
68	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.04.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	400,00	Semester 1	400.000,00	92.00/04.0/000520/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.753.345,00
69	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.1.02.04.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	0,00	Semester 2	444.125,00	92.00/04.0/000520/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/	26 Juli 2024	26 Juli 2024	290.753.345,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

							Kertas dan Cover						M/7/2024			
70	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	0,00	Semester 2	5.000.000,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00
71	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	118.440,00	Semester 1	45.216.000,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00
72	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	116.666,00	Semester 2	20.616.666,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00
73	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	396.900,00	Semester 1	167.354.000,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

74	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	160.000,00	Semester 1	5.000.000,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00
75	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	450,00	Semester 2	70.618.000,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00
76	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	12.618,00	Semester 1	4.479.618,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00
77	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH	8.334,00	Semester 1	41.233.334,00	92.00/04.0/000692/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2024	25 September 2024	26 September 2024	101.250.575,00
78	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan	24 Desember	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI	314,00	Semester 2	4.479.617,00	92.00/04.0/000692	25 September	26 September	101.250.575,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	HAN DAN OTONOMI DAERAH		Daerah			24	n untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2024	KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH				/TU/4.01.00.00.00.01.0000/P4/9/2024	ber 2024	mber 2024	0
79	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	31 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	0,00	Semester 2	19.850.000,00	92.00/04.00/000836/TU/4.01.00.00.00.01.0000/PR/11/2024	20 November 2024	21 Nove mber 2024	1.001.023.706,00
80	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	0,00	Semester 2	7.059.260,00	92.00/04.00/000836/TU/4.01.00.00.00.01.0000/PR/11/2024	20 November 2024	21 Nove mber 2024	1.001.023.706,00
81	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	1.040.900,00	Semester 2	530.046.000,00	92.00/04.00/000836/TU/4.01.00.00.00.01.0000/PR/11/2024	20 November 2024	21 Nove mber 2024	1.001.023.706,00
82	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung	31 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	0,00	Semester 2	40.000.000,00	92.00/04.00/000836/TU/4.01.00.00.00.00.00.00.	20 November 2024	21 Nove mber 2024	1.001.023.706,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

	DAERAH						Kantor						01.0000/ PR/11/20 24			
83	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.0 1.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	0,00	Semester 2	205.680.0 00,00	92.00/04. 0/000836 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/11/20 24	20 Novem ber 2024	21 Nove mber 2024	1.001.0 23.706, 00
84	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.0 2.01.00 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	0,00	Semester 2	52.800.00 0,00	92.00/04. 0/000836 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/11/20 24	20 Novem ber 2024	21 Nove mber 2024	1.001.0 23.706, 00
85	PROGRAM PEMERINTAH HAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03. 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1. 02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.0 2.01.00 04	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	31 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	500.000,0 0	Semester 2	375.000.0 00,00	92.00/04. 0/000836 /TU/4.01. 0.00.0.00. 01.0000/ PR/11/20 24	20 Novem ber 2024	21 Nove mber 2024	1.001.0 23.706, 00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

86	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	31 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	100.000,00	Semester 2	70.600.000,00	92.00/04.0/000836/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	20 November 2024	21 Nove mber 2024	1.001.023.706,00
87	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	31 Desember 2024	SETORAN SISA TU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD (DESK PILKADA)	0,00	Semester 2	790.000,00	92.00/04.0/000836/TU/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	20 November 2024	21 Nove mber 2024	1.001.023.706,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 PROGRAM : 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 KEGIATAN : 4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 SUB KEGIATAN : 4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan

N O	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/GU	TU	LS	UP/GU	TU	LS		
1	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp23.400.000,00	Rp23.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.612.586,00	Rp9.612.586,00	Rp0,00	Rp2.358.641,00	Rp7.262.000,00	Rp0,00	Rp2.350.000,00	Rp7.262.000,00	Rp586,00	Rp586,00
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp2.137.040,00	Rp2.137.040,00	Rp0,00	Rp750.330,00	Rp1.387.000,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp1.387.000,00	Rp40,00	Rp40,00
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp405.200,00	Rp405.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp405.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp405.000,00	Rp200,00	Rp200,00
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp34.800.000,00	Rp34.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00
6	5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp5.249.332,00	Rp5.249.332,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.391.937,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.391.937,00	Rp857.395,00	Rp857.395,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

7	5.1.02.02.01.002 7	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp399.000.000,0 0	Rp399.000.000,0 0	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp384.000.000,0 0	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp384.000.000,0 0	Rp15.000.000,0 0	Rp15.000.000,0 0
8	5.1.02.02.01.007 1	Belanja Lembur	Rp36.440.000,00	Rp36.440.000,00	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp36.440.000,00	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp36.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00
9	5.1.02.02.04.003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00
10	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp795.972.000,0 0	Rp795.972.000,0 0	Rp0,0 0	Rp795.972.000,0 0	Rp0,00	Rp0,0 0	Rp795.794.400,0 0	Rp0,00	Rp177.600,00	Rp177.600,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 PROGRAM : 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 KEGIATAN : 4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 SUB KEGIATAN : 4.01.03.1.01.0002 - Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
				UP/GU	TU	LS	UP/GU	TU	LS		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.188.717,00	Rp1.188.717,00	Rp0,00	Rp1.174.789,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.152.450,00	Rp0,00	Rp36.267,00	Rp36.267,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.559.500,00	Rp1.559.500,00	Rp0,00	Rp1.559.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.526.750,00	Rp0,00	Rp32.750,00	Rp32.750,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.000,00	Rp0,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp43.065.000,00	Rp43.065.000,00	Rp0,00	Rp43.065.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.060.000,00	Rp0,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp31.250.000,00	Rp31.250.000,00	Rp0,00	Rp31.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp3.200.000,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp336.104.000,00	Rp336.104.000,00	Rp0,00	Rp336.104.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.996.547,00	Rp0,00	Rp107.453,00	Rp107.453,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp22.400.000,00	Rp22.400.000,00	Rp0,00	Rp22.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 PROGRAM : 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 KEGIATAN : 4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah
 SUB KEGIATAN : 4.01.03.1.02.0003 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/GU	TU	LS	UP/GU	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.305.294,00	Rp2.305.294,00	Rp0,00	Rp2.305.294,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.301.030,00	Rp0,00	Rp4.264,00	Rp4.264,00
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp844.125,00	Rp844.125,00	Rp0,00	Rp844.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp843.725,00	Rp0,00	Rp400,00	Rp400,00
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp13.931.468,00	Rp13.931.468,00	Rp0,00	Rp13.931.468,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.927.970,00	Rp0,00	Rp3.498,00	Rp3.498,00
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp107.300.000,00	Rp107.300.000,00	Rp0,00	Rp107.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp12.300.000,00	Rp12.300.000,00	Rp0,00	Rp12.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

6	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp110.000.000,00	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp124.708.000,00	Rp124.708.000,00	Rp0,00	Rp124.808.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.583.180,00	Rp0,00	Rp124.820,00	Rp124.820,00
8	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp67.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp67.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.200.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

PROGRAM : 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KEGIATAN : 4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

SUB KEGIATAN : 4.01.03.1.01.0003 - Fasilitas Penataan Wilayah

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/G U	TU	LS	UP/G U	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp17.647.500,00	Rp17.647.500,00	Rp0,00	Rp8.823.750,00	Rp8.820.000,00	Rp0,00	Rp8.820.000,00	Rp8.820.000,00	Rp7.500,00	Rp7.500,00
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp5.625.000,00	Rp5.625.000,00	Rp0,00	Rp2.812.500,00	Rp2.812.000,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00	Rp2.812.000,00	Rp13.000,00	Rp13.000,00
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp71.340.000,00	Rp71.340.000,00	Rp0,00	Rp35.670.000,00	Rp35.650.000,00	Rp0,00	Rp35.660.000,00	Rp35.650.000,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp12.850.000,00	Rp12.850.000,00	Rp0,00	Rp12.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp124.404.000,00	Rp124.404.000,00	Rp0,00	Rp124.404.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.404.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

		dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan										
6	5.1.02.02.01.00 71	Belanja Lembur	Rp13.000.000,0 0	Rp13.000.000,0 0	Rp0,0 0	Rp4.500.000,00	Rp8.490.000,0 0	Rp0,0 0	Rp4.500.000,00	Rp8.490.000,0 0	Rp10.000,0 0	Rp10.000,0 0
7	5.1.02.02.04.00 36	Belanja Sewa Kendaraa n Bermotor Penumpan g	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp0,0 0	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp0,0 0	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp100.000, 00	Rp100.000, 00
8	5.1.02.02.05.00 09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemua n	Rp10.000.000,0 0	Rp10.000.000,0 0	Rp0,0 0	Rp10.000.000,0 0	Rp0,00	Rp0,0 0	Rp10.000.000,0 0	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9	5.1.02.04.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp128.422.000, 00	Rp128.422.000, 00	Rp0,0 0	Rp128.422.000, 00	Rp0,00	Rp0,0 0	Rp127.911.431, 00	Rp0,00	Rp510.569, 00	Rp510.569, 00
10	5.1.02.04.01.00 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp54.000.000,0 0	Rp54.000.000,0 0	Rp0,0 0	Rp54.000.000,0 0	Rp0,00	Rp0,0 0	Rp54.000.000,0 0	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 PROGRAM : 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 KEGIATAN : 4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah
 SUB KEGIATAN : 4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan

N O	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/G U	TU	LS	UP/G U	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0 024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.844.996,00	Rp3.844.996,00	Rp0, 00	Rp1.922.498,0 0	Rp0,00	Rp0, 00	Rp1.922.498,0 0	Rp0,00	Rp1.922.498, 00	Rp1.922.498, 00
2	5.1.02.01.01.0 025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.798.590,00	Rp1.798.590,00	Rp0, 00	Rp899.295,00	Rp0,00	Rp0, 00	Rp899.295,00	Rp0,00	Rp899.295,0 0	Rp899.295,0 0
3	5.1.02.01.01.0 026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.284.500,00	Rp5.284.500,00	Rp0, 00	Rp2.400.000,0 0	Rp0,00	Rp0, 00	Rp2.400.000,0 0	Rp0,00	Rp2.884.500, 00	Rp2.884.500, 00
4	5.1.02.01.01.0 029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0, 00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp0, 00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,0 0	Rp800.000,0 0
5	5.1.02.01.01.0 035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cend era Mata	Rp17.500.000,0 0	Rp17.500.000,0 0	Rp0, 00	Rp17.500.000, 00	Rp0,00	Rp0, 00	Rp16.510.000, 00	Rp0,00	Rp990.000,0 0	Rp990.000,0 0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

6	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp1.767.450.000,00	Rp1.767.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.748.361.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.748.361.000,00	Rp19.089.000,00	Rp19.089.000,00
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp107.940.000,00	Rp107.940.000,00	Rp0,00	Rp107.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp81.700.000,00	Rp81.700.000,00	Rp0,00	Rp81.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.400.000,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
9	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp27.000.000,00	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp18.045.000,00	Rp0,00	Rp8.948.000,00	Rp18.045.000,00	Rp7.000,00	Rp7.000,00
10	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12	5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Rp90.550.000,00	Rp90.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00
13	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Rp142.000.000,00	Rp142.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.136.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.136.000,00	Rp1.864.000,00	Rp1.864.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

14	5.1.02.04.01.0 001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp126.272.000, 00	Rp126.272.000, 00	Rp0, 00	Rp126.272.00 0,00	Rp0,00	Rp0, 00	Rp126.156.02 0,00	Rp0,00	Rp115.980,0 0	Rp115.980,0 0
15	5.2.02.10.01.0 002	Belanja Modal Personal Computer	Rp17.999.000,0 0	Rp17.999.000,0 0	Rp0, 00	Rp17.999.000, 00	Rp0,00	Rp0, 00	Rp17.024.000, 00	Rp0,00	Rp975.000,0 0	Rp975.000,0 0
16	5.2.02.10.01.0 003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp4.749.500,00	Rp4.749.500,00	Rp0, 00	Rp4.749.500,0 0	Rp0,00	Rp0, 00	Rp4.599.000,0 0	Rp0,00	Rp150.500,0 0	Rp150.500,0 0

SUB SKPD

: 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

PROGRAM : 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 KEGIATAN : 4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah
 SUB KEGIATAN : 4.01.03.1.02.0001 - Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

N O	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/G U	TU	LS	UP/G U	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp17.130.230,00	Rp17.130.230,00	Rp0,0 0	Rp17.130.230,00	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp16.990.216,00	Rp0,0 0	Rp140.014,00	Rp140.014,00
2	5.1.02.01.01.002 5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.402.000,00	Rp1.402.000,00	Rp0,0 0	Rp1.402.000,00	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp1.402.000,00	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp0,00
3	5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp31.450.000,00	Rp31.450.000,00	Rp0,0 0	Rp31.450.000,00	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp31.250.000,00	Rp0,0 0	Rp200.000,00	Rp200.000,00
4	5.1.02.01.01.002 7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp990.000,00	Rp990.000,00	Rp0,0 0	Rp990.000,00	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp990.000,00	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp0,00
5	5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp300.040.000,0 0	Rp300.040.000,0 0	Rp0,0 0	Rp300.040.000,0 0	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp300.040.000,0 0	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp0,00
6	5.1.02.01.01.005 3	Belanja Makanan dan Minuman	Rp63.600.000,00	Rp63.600.000,00	Rp0,0 0	Rp63.600.000,00	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp63.600.000,00	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp0,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

		Jamuan Tamu										
7	5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp116.800.000,0 0	Rp116.800.000,0 0	Rp0,0 0	Rp116.800.000,0 0	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp114.400.000,0 0	Rp0,0 0	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
8	5.1.02.02.01.000 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp498.000.000,0 0	Rp498.000.000,0 0	Rp0,0 0	Rp498.000.000,0 0	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp497.500.000,0 0	Rp0,0 0	Rp500.000,00	Rp500.000,00
9	5.1.02.02.01.007 1	Belanja Lembur	Rp51.000.000,00	Rp51.000.000,00	Rp0,0 0	Rp51.000.000,00	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp50.754.000,00	Rp0,0 0	Rp246.000,00	Rp246.000,00
10	5.1.02.02.04.003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang g	Rp125.500.000,0 0	Rp125.500.000,0 0	Rp0,0 0	Rp125.500.000,0 0	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp125.400.000,0 0	Rp0,0 0	Rp100.000,00	Rp100.000,00
11	5.1.02.02.04.005 8	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	Rp240.000.000,0 0	Rp240.000.000,0 0	Rp0,0 0	Rp240.000.000,0 0	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp239.342.516,0 0	Rp0,0 0	Rp657.484,00	Rp657.484,00
12	5.1.02.02.05.000 1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,0 0	Rp50.000.000,00	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp50.000.000,00	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp0,00
13	5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp925.272.000,0 0	Rp925.272.000,0 0	Rp0,0 0	Rp926.000.000,0 0	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp924.177.201,0 0	Rp0,0 0	Rp1.094.799,00	Rp1.094.799,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

14	5.2.02.10.01.000 2	Belanja Modal Personal Computer	Rp17.999.000,00	Rp17.999.000,00	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp0,0 0	Rp0,0 0	Rp0,00	Rp0,0 0	Rp17.999.000,0 0	Rp17.999.000,0 0
----	-----------------------	--	-----------------	-----------------	------------	--------	------------	------------	--------	------------	---------------------	---------------------

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROGRAM : 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
KEGIATAN : 4.01.03.1.03 - Fasilitas Kerja Sama Daerah
SUB KEGIATAN : 4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

N O	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/G U	TU	LS	UP/G U	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.932.465,00	Rp4.932.465,00	Rp0,00	Rp4.932.465,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.886.630,00	Rp0,00	Rp45.835,00	Rp45.835,00
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp65.250.000,00	Rp65.250.000,00	Rp0,00	Rp32.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.625.000,00	Rp0,00	Rp32.625.000,00	Rp32.625.000,00
3	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp49.500.000,00	Rp49.500.000,00	Rp0,00	Rp24.750.000,00	Rp24.751.000,00	Rp0,00	Rp24.740.000,00	Rp24.751.000,00	Rp9.000,00	Rp9.000,00
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp104.740.000,00	Rp104.740.000,00	Rp0,00	Rp104.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.727.200,00	Rp0,00	Rp12.800,00	Rp12.800,00
5	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Rp134.830.000,00	Rp134.830.000,00	Rp0,00	Rp134.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.727.800,00	Rp0,00	Rp102.200,00	Rp102.200,00
6	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	Rp35.998.000,00	Rp35.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.960.000,00	Rp38.000,00	Rp38.000,00
7	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp4.749.500,00	Rp4.749.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp49.500,00	Rp49.500,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROGRAM : 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
KEGIATAN : 4.01.03.1.03 - Fasilitas Kerja Sama Daerah
SUB KEGIATAN : 4.01.03.1.03.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah

N O	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/G U	TU	LS	UP/G U	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp8.959.235,00	Rp8.959.235,00	Rp0,00	Rp8.971.853,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.946.303,00	Rp0,00	Rp12.932,00	Rp12.932,00
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp2.500,00	Rp2.500,00	Rp0,00	Rp2.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp61.850.000,00	Rp61.850.000,00	Rp0,00	Rp61.858.334,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.725.000,00	Rp0,00	Rp125.000,00	Rp125.000,00
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp86.000.000,00	Rp86.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.990.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
5	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp45.216.000,00	Rp45.216.000,00	Rp0,00	Rp45.334.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.097.560,00	Rp0,00	Rp118.440,00	Rp118.440,00
6	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Rp237.972.000,00	Rp237.972.000,00	Rp0,00	Rp238.368.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.574.650,00	Rp0,00	Rp397.350,00	Rp397.350,00
7	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.680.000,00	Rp0,00	Rp320.000,00	Rp320.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 PROGRAM : 4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 KEGIATAN : 4.01.03.1.03 - Fasilitas Kerja Sama Daerah
 SUB KEGIATAN : 4.01.03.1.03.0002 - Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta

N O	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/G U	TU	LS	UP/G U	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp21.036.600,00	Rp21.036.600,00	Rp0,00	Rp21.036.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.036.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp82.025.000,00	Rp82.025.000,00	Rp0,00	Rp82.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.016.000,00	Rp0,00	Rp9.000,00	Rp9.000,00
3	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp56.700.000,00	Rp56.700.000,00	Rp0,00	Rp56.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp93.816.000,00	Rp93.816.000,00	Rp0,00	Rp93.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.346.000,00	Rp0,00	Rp1.470.000,00	Rp1.470.000,00
5	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Rp200.256.000,00	Rp200.256.000,00	Rp0,00	Rp200.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.224.200,00	Rp0,00	Rp31.800,00	Rp31.800,00
6	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp12.832.666,00	Rp12.832.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.800.000,00	Rp32.666,00	Rp32.666,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

SUB SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROGRAM : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN : 4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN : 4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

N O	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN SPD TERBIT	RENCANA REALISASI KEGIATAN			REALISASI KEGIATAN			SISA PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN SPD TERBIT
					UP/G U	TU	LS	UP/G U	TU	LS		
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.349.818,00	Rp1.349.818,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.340.000,00	Rp9.818,00	Rp9.818,00
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp2.790.000,00	Rp2.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.780.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.700.000,00	Rp8.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp12.792.000,00	Rp12.792.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.784.000,00	Rp8.000,00	Rp8.000,00
5	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp99.568.000,00	Rp99.568.000,00	Rp0,00	Rp100.739.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.565.296,00	Rp0,00	Rp2.704,00	Rp2.704,00

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan Tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum dikemukakan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat Tahun 2024, disisi lain Laporan ini masih terdapat kekurangan yang tidak disadari oleh Biro Pemerintahan, untuk itu perlu mendapat bimbingan / arahan dari Pimpinan dan yang berkopentent.

B. SARAN

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat Tahun 2024 ini, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua Barat sehingga nantinya tercipta hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan baik kepada Pemerintah maupun kepada Masyarakat Papua Barat.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sekaligus untuk mendapat petunjuk demi perbaikan ke depan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Papua Barat Tahun 2024 ini dibuat untuk disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**

OCTOFIANUS MAYOR, S. Sos
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19650602 199003 1 015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

Lampiran Foto-Foto Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024

Bagian : Pemerintahan Umum

No	Nama Kegiatan	Dokumentasi Kegiatan, Tanggal Kegiatan dan Keterangan
1	Penyusunan LPPD	



2 Rakor SPM



Register kampung persiapan



No	Nama Kegiatan	Dokumentasi Kegiatan di Bagian Otonomi Daerah
1	Pemantauan PILPRES/PILKADA	

2		
		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2024

Bagian : Dokumentasi Kegiatan Kerjasama

Sub Bagian : Pelayanan Publik

No	Nama Kegiatan	Dokumentasi Kegiatan (waktu pelaksanaan, output pelaksanaan dll)
1	Pembahasan Kerja Sama Bersama Pj. SEKDA	

		
2	Pembahasan Kerjasama Badan Usaha/Swasta.	

3	EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA DI KABUPATEN SE PAPUA BARAT	
	MONITORING KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DI KABUPATEN SE PAPUA BARAT	

DOKUMENTASI KERJABAKTI, OLAHRAGA DAN BAKTI SOSIAL

No	Nama Kegiatan	Dokumentasi Kegiatan (waktu pelaksanaan, output pelaksanaan dll)
1	PEMBUATAN KEBUN BIRO PEMERINTAHAN	
2	KERJA BAKTI	

3

OLAHRAGA

